

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai di Apotek Kunthi 12 sudah sesuai dengan Permenkes nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Apotek, pengelolaan sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai meliputi perencanaan kebutuhan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan, pemusnahan, serta pemantauan dan evaluasi.

B. SARAN

Untuk meningkatkan mutu dan pelayanan kefarmasian di Apotek Kunthi 12 sesuai dengan Permenkes nomor 73 tahun 2016 tentang standart pelayanan kefarmasian di apotek maka untuk perkembangannya dilakukan pelayanan farmasi klinis pemantauan terapi obat dan monitoring efek samping obat

DAFTAR PUSTKA

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2016 . *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Instalasi Farmasi*. Jakarta : Depkes RI
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek* Jakarta : Depkes RI
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit* Jakarta : Depkes RI
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2016 . *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2016 tentang Standar Rumah Sakit*. Jakarta : Depkes RI
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2016 . *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2016 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*. Jakarta : Depkes RI
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2015 . *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penggolongan Obat kPsikotropika*. Jakarta : Depkes RI
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 1997 . *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika*. Jakarta : Depkes RI
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2014 . *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penggolongan Obat Psikotropika*. Jakarta : Depkes RI
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2015 . *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika*. Jakarta : Depkes RI
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2009 . *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta : Depkes RI
- Undang-Undang Kesehatan RI. 2009 . *Undang – Undang Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Jakarta : Depkes RI

Undang-Undang Kesehatan RI. 2014 . *Undang – Undang Kesehatan RI* Nomor 36
Tahun 2014 tentang *Tenaga Kesehatan*. Jakarta : Depkes RI